Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra Otonom Atas Tubuhnya, Sehat dan Kreatif

Newsletter III
Januari - Juni 2016



h.10
FKPAR



h.18
FMS



h.25
Cerita
Perubahan



Dok. Permampu

Program Team Leader MAMPU Elizabeth Elson foto bersama dengan Tim Kerja dan para Direktur Lembaga anggota Permampu

PEMBELAJARAN

Setelah satu tahun program HKSR Permampu berjalan, MAMPU meminta untuk membuat laporan mengenai pembelajaran yang diperoleh. Pembelajaran ini mencakup capaian kunci, faktor pendukung, tantangan yang dihadapi, dan analisis gender.

Pembelajaran khusus yang dicatat oleh Permampu adalah menguatnya kesadaran mengenai hubungan antarahak-hak perempuan dengan kepemimpinan dan kemiskinan. Juga pentingnya aspek ekonomi dalam pengorganisasian dan menyadari ekonomi sebagai tangga untuk mencapai aspek penguatan politis. ■

Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra Otonom Atas Tubuhnya, Sehat dan Kreatif

Pemimpin Redaksi	Dina Lumbantobing	**Kontributor**	Direktur Eksekutif,
Sekretaris Redaksi	Sustriana Saragih		Koord.Program
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing		Staf Lapang Lembaga Anggota
	Tety Sumeri	**Layout**	Mohamad Reza
Editor Foto	Mohamad Reza	**Distribusi**	Sustriana Saragih

Sekretariat PERMAMPU
Jl.Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 Padang Bulan, Medan 20141 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 I e-mail: konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org I Facebook: PermampuConsortium

Selamat bertemu kembali di terbitan ketiga newsletter ketiga ini. Penajaman program yang dilaksanakan di semester kedua 2015 telah semakin membantu Permampu untuk memfokuskan diri kepada kegiatan-kegiatan yang menuju ke hasil akhir proyek atau yang disebut dengan EOPO. Untuk Program Advokasi HKSR, Permampu telah membangun 4 EOPO sebagai berikut:

- EOPO 1. Perempuan pedesaan, miskin kota, muda memiliki kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi untuk pemenuhan HKSR
- EOPO 2. Lembaga penyedia layanan menyediakan layanan HKSR yang mudah diakses tepat dan bermutu
- EOPO 3. Institusi keluarga, adat dan agama melakukan praktek adat dan keagamaan yang berpihak terhadap HKSR
- EOPO 4. Pemerintah desa dan Kab/Kota melakukan perubahan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan HKSR

Dalam newsletter ini pembaca dan seluruh pihak dapat melihat bagaimana Permampu telah melaksanakan EOPO 1 yang merupakan upaya langsung terhadap pemanfaat utama program ini. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kelompok dampingan, yang menjadi basis dari FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput). Sementara untuk EOPO 2, 3 dan 4; juga telah dimulai sebagai upaya advokasi kebijakan kepada lembaga-lembaga yang menjadi pihak-pihak utama, yang dilaksanakan melalui FMS (Forum Multi Stakeholder).

Silahkan membaca seluruh berita-berita kami yang diangkat dari semua kegiatan lapang maupun di tingkat pengelola Permampu. Bila ada informasi yang dibutuhkan, atau klarifikasi dsb., silahkan hubungi kami di alamat Sekretariat Konsorsium.

Salam hangat,
Dina Lumbantobing
(Koord. Konsorsium Permampu)

Daftar Isi

1 Editorial
2 Salam Redaksi
3 Akuntabilitas
10 FKPAR
18 FMS
25 Cerita Perubahan
28 Liputan Media PERMAMPU

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

Konsorsium PERMAMPU

Australian Aid

Capaian PERMAMPU Januari - Juni 2016 & Laporan Realisasi Anggaran PERMAMPU 2016

Oleh : Dina Lumbantobing
Koordinator Konsorsium Permampu

Program Berjalan

- Seluruh anggota Konsorsium sepakat untuk melakukan pendidikan publik untuk advokasi kasus YY dan sekaligus pernyataan betapa seluruh wilayah telah berada dalam kondisi darurat Kekerasan Seksual.
- Sudah ada tindakan nyata FKPAR, FMS, kelompok CU, dan jaringan NGO dalam mendukung program-program HKSR seperti diskusi-diskusi, lokalatih, aksi bersama, audiensi, seminar, musyawarah, dan lain sebagainya
- Mulai terlihat adanya keterlibatan pemerintah dalam program-program HKSR seperti:
  - » Pemerintah Kota melalui BPPKB Kota Bandar Lampung memiliki kemauan berkonsultasi dan melibatkan Damar untuk implementasi SPM Kesehatan terkait layanan HKSR
  - » Telah ada MoU kerjasama pelaksanaan program KB/HKSR melalui menyuluhan, advokasi, sosialisasi KB antara Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB dengan PESADA
  - » Komisi VI yang diwakilkan oleh Ketua dan 5 orang Anggotanya merespon positif kunjungan gerakan perempuan dan akan menindaklanjuti dengan memfasilitasi pertemuan lintastakeholder (BP3A, Dinkes, Dinas Pendidikan, P2TP2A, RS dan puskesmas, BPJS, dll) dengan tujuan untuk memperkuat komitmen dan menyusun rencana aksi bersama untuk mengatasi hal ini
  - » Di Desa Talang Tinggi yang merupakan dampingan Cahaya Perempuan WCC telah menganggarkan dana di RPJMD untuk peningkatan kapasitas anggota kelompok perempuan dewasa. PEMDA Rejang Lebong melalui Dinas Kesehatan telah meluncurkan program **SMS Gateway yang diberi nama "SMS Bunda" untuk pelayanan informasi Kespro bagi Ibu Hamil**.
  - » Dan lain sebagainya

Jangkauan Stakeholder & Pengorganisasian

Jumlah penerima manfaat pada semester **ini berjumlah 11.465 orang** yang terdiri dari **9.566 perempuan dan 1.899 laki-laki**. Jumlah penerima manfaat dari **media online dan radio** sebagai sarana publikasi program yang dilakukan oleh Permampu saat ini dapat dinikmati oleh **178.477 orang**.

Pada semester ini, delapan provinsi **sudah membentuk 62 kelompok baru** dengan jumlah perempuan 1.233 serta **memperkuat dan mengembangkan 38 kelompok yang sudah ada dengan jumlah 742 perempuan dan 20 laki-laki**.

Di delapan provinsi, konsorsium secara aktif merangkul stakeholder dari berbagai bidang mulai dari **Tokoh Adat (308 orang), Tokoh Agama (215 orang), PEMBATRA (98 orang), Instansi Pemerintah** (Dinas, Bupati, Sekda, Kepala Desa, Camat, Lurah, BPD, Badan PP & KB/BKKBN, P2TP2A) **(680 orang)**, **Penyedia Layanan Kesehatan** (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Polindes, Klinik) **(195 orang)**, **Tenaga Kesehatan** (Dokter, Bidan, Perawat) **(99 orang), Sekolah** (Kepala Sekolah, Guru, Siswa, OSIS/PIK-R) **(623 orang)**, **Parlemen** (DPD dan DPRD) **(53 orang), Aparat Penegak Hukum** (Pengadilan Agama dan Polisi) **(185 orang). Selain itu, konsorsium juga melibatkan media (72 orang), akademisi (103 orang), ormas/LSM (136 orang), para suami/ayah (122 orang)** untuk mendukung percepatan pemenuhan HKSR bagi perempuan di seluruh aspek kehidupan perempuan.

Kelompok ekonomi (simpan – pinjam) perempuan pedesaan dan miskin kota semakin mandiri dan berkelanjutan. Kelompok simpan pinjam pada semester ini berjumlah 405 kelompok dengan jumlah anggota 15.606 orang dan dengan total jumlah tabungan sebesar Rp. 28.199.287.924

Lembaga	Jumlah Kel. Simpan Pinjam	Jumlah Anggota		Jumlah Tabungan/ Saham
		Perem-puan Dewasa	Boys & Girls	
Flower Aceh	14	355		Rp 14.121.000
Pesada SUMUT	260	12.295	2.889	Rp 23.717.555.824
LP2M SUMBAR	19	285		Rp 116.422.400
PPSW Sumatera-Riau	73	1708		Rp 4.042.700.000
APM Jambi	6	264		Rp 164.164.000
Cahaya Perempuan WCC	15	284		Rp 37.389.600
WCC Palembang	5	164		Rp 22.299.000
Damar Lampung	13	251		Rp 84.636.100
Total	405	15.606	2.889	Rp 28.199.287.924

PROGRAM

A. Partisipasi di Women Deliver Conference 2016

Pada tanggal 16 sampai 19 May 2016, Dina Lumbantobing (Koordinator Permampu) bersama Tri Hastuti Nur (Pimpinan Aisyiah) memperoleh kesempatan untuk mengikuti sebuah Konperensi Besar tingkat Internasional, bernama Konperensi Women Deliver. Konperensi ini adalah konperensi keempat yang focus kepada hak-hak perempuan dan anak perempuan. bertujuan untuk:

> *Bagaimana mengimplementasikan **SDGs 2030** agar berguna untuk **anak perempuan dan perempuan**, dengan fokus khusus pada **kesehatan ibu, kesehatan seksual & reproduksi**; serta pada **kesetaraan gender, pendidikan , lingkungan dan penguatan ekonomi***

SDGs 2030 adalah lanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs), yang berisi 17 tujuan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang harus dicapai di tahun 2030. Dokumen yang menjadi acuan pembangunan ini telah disepakati oleh Negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Secara khusus Goal 5 menjadi acuan utama para aktivis dan lembaga untuk Hak Azasi Perempuan, yang isinya adalah:

> **Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan**

Beberapa catatan menarik dari Konperensi ini adalah :

- **Dalam Acara Pembukaan & Pleno,** Presiden Women Deliver menyambut peserta dengan menyebut bahwa **ini adalah Konperensi besar yang berhasil membawa secara langsung 5.543 peserta dari 169 negara (tidak ada data terpilah), dan dari 2.500an organisasi; serta sekitar 10 juta peserta secara virtual/melalui internet**.
- Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyebut bahwa **Kesetaraan gender adalah fondasi** untuk mencapai Pembangunan yang berkelanjutan dan juga Pertumbuhan Ekonomi.
- Sakena Yacoobi, (CEO & Pendiri Afghan Institute of Learning) menekankan pentingnya pendidikan yang bermutu untuk perempuan, yang membangun cara berpikir kritis untuk dapat mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) untuk mentransformasi kehidupan.
- Quota untuk representasi perempuan serta akuntabilitas sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender.
- Untuk menarik perhatian pendanaan, perlu ditunjukkan kasus-kasus keberhasilan, data jumlah dan kualitas perempuan di pasar tenaga kerja yang dapat menujukkan kontribusi yang sama dengan laki-laki serta bagaimana cara untuk mencapainya. Lakukan tracking data, dan tunjukkan secara luas, kompetisi dengan negara-negara lain. **Ingat: penguatan perempuan bukanlah membuat pihak lain menjadi tidak kuat/disempower, penguatan bukanlah kompetisi!**
- Julia Gillard (Board Chair, Global Partnership for Education, bekas Perdana Menteri Australia) menekankan **pentingnya pendidikan untuk mencapai kesetaraan gender** mulai dari SD, dan pendidikan hendaknya fokus ke pembelajaran.
- Untuk anak perempuan dan perempuan muda, akses ke pendidikan yang berkualitas dan keamanan dalam memperoleh pendidikan sangat penting untuk memastikan perempuan tidak drop out. Juga ruang aman untuk suara perempuan. Di banyak Negara, perempuan terpaksa harus menjual tubuhnya untuk dapat membiayai pendidikan. Maka **tujuan 5 tidak mungkin dicapai tanpa goal 4**.

1. Terlihat nilai dan harapan para pembicara agar anak perempuan dapat menjadi pemimpin, Negara-negara mampu merubah peraturan perundangan, mempunyai akses ke sumberdaya ekonomi (kredit) dan bahkan untuk yang disabilitas dapat meraih mimpinya.







Searah jarum jam. Empat peserta (Henny-MAMPU, Tri Hastuti Nur-Aisyiah, Dina-Permampu & Noor dari Aisyiah) menyempatkan diri berpose sejenak di depan back drop 'Women Deliver' (atas). Pidato Hillary Clinton via video saat penutupan Konperensi dan Boots yang memperkenalkan pembalut perempuan yang bisa dipakai berulang (bisa dicuci).

2. Tiga pembicara dari Belanda, India dan Maroco mebicarakan bagaimana kesulitan memperjuangkan aborsi yang aman, bahkan meski hukum telah melegalkannya seperti di Belanda dan India. Masalah aborsi menurut mereka adalah masalah minimnya akses ke kontrasepsi, banyaknya batasan yang membuat perempuan tidak dapat memutuskan untuk dirinya sendiri. Hal ini seharusnya dapat diatasi bila kepemimpinan perempuan dapat diterima dan data serta anggaran tersedia.

B. Exchange Learning

Pada tanggal 23 sampai 28 Mei 2016; lima orang Direktur lembaga anggota Permampu yaitu: Desy Setiawaty/Flower Aceh, Ramida Sinaga/Pesada- Host & Pesada SUMUT, Ramadhaniati/LP2M SUMBAR, Endang Sulfiana/PPSW Sumatera-Riau, Yeni Roslaini/ WCC Palembang – SUMSEL mengadakan Exchange Learning ke Darwin dan Alice Spring, Australia.

Dari perjalanan ini, mereka mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan Program Advokasi HKSR. Adapun tujuan dari kunjungan belajar ini adalah:

1. Mempelajari program lembaga yang dikunjungi tentang pendidikan kesehatan reproduksi di penduduk asli (Aborigin)
2. Memperoleh infromasi mengenai pelayanan kesehatan untuk issue kebutuhan khusus misalnya: kerahasiaan, data, aborsi, kontrasepsi untuk perempuan yang tidak menikah, ibu muda, yang hamper menopause dsb; baik dari klinik berbasis komunitas mapun pelayanan kesehatan di wilayah miskin kota.
3. Membangun kerjasama awal dengan ORNOP Perempuan di Australia.

Dari kunjungan ini, peserta memperoleh pembelajaran sbb:

1. Terjadi sinergisitas antara akademisi, NGO dan pemerintah pusat, pemerintah federal dan pemerintah local (termasuk polisi, lawyer, psikiater) dalam penanganan permasalahan perempuan (domestic violence perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alcohol dan petrol.
2. Pemberian layanan kebutuhan dasar untuk suku Aborigin sangat lengkap, khususnya berkaitan dengan kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian dan kesehatan. Perlu peningkatan kualitas hidup dari Aborigin, dari segi sumber daya manusia termasuk livelihood nya.



Setelah diskusi hangat, peserta Exchange Learning berfoto dengan Direktur, Peneliti dan Dosen dari International Graduate Center of Education, Charles Darwin University, Darwin, Australia.

3. Sinergisitas terjadi dalam aspek:
   - Pemberian informasi.
   - Peningkatan kapasitas terhadap tenaga kesehatan (dokter, bidan/perawat, tradisional healer).
   - Pelayanan dalam bentuk konseling, penanganan pada perempuan pada setiap tahapan kehamilan (pra kehamilan, kehamilan dan pasca kehamilan).
4. Pemerintah Australia sangat ramah terhadap disabilitas, di mana seluruh fasilitas publik seperti transportasi umum dilengkapi dengan jembatan untuk kursi roda, juga tangga lurus di setiap gedung public. Di setiap persimpangan jalan juga disiapkan alat bagi tuna netra untuk mengetahui bahwa ybs sudah sampai di persimpangan.
5. Pemerintah Australia memberikan dukungan konkrit (anggaran) untuk implementasi program dan operasional pada NGO sekitar 70-75 %. Namun begitu, mereka juga melakukan fundraising dengan mempromosikan dan menjual kerajinan yang dibuat oleh kaum aborigin (lukisan, souvenir, tenun, obat tradisional)
6. Ramuan tradisional (Aborigin) seperti balsem, hand & body lotion, lip balm, dll diproduksi dengan memperhatikan hygiene dan dikemas menarik, dipromosikan dan dijual melalui online dan pameran. Ini salah satu strategi fundrarising bagi NGO yang tim 1 kunjungi.
7. Setiap lembaga NGO yang dikunjungi memiliki program dan fasilitas lengkap seperti One stop service & Learning (OSSL) sesuai visi dan misi lembaganya.

C. Audiensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan program MAMPU dan memfasilitasi diskusi antara mitra MAMPU dengan Mendikbud dan Dirjen Dikdasmen. Roadshow ini merupakan yang ke-3 yang difasilitasi MAMPU yaitu pertama ke Kantor staf Presiden (KSP) kemudian ke Kemenkes dan kali ini ke Menteri Pendidikan. Rundown pertemuan juga sama, yaitu diawali dengan informasi singkat mengenai Program MAMPU dan dilanjut dengan kesempatan bagi setiap mitra menyampaikan satu atau maksimal dua isu strategis berikut rekomendasi, serta dukungan yang diharapkan dari Kemendikbud.

Berdasarkan hasil asesmen, studi dan monitoring dengan menggunakan perspektif perempuan yang dilakukan oleh mitra-mitra MAMPU bersama dengan kelompok-kelompok perempuan akar rumput di lebih dari 1.800 desa yang menjadi lokasi program, beberapa isu terkait kebijakan dibidang pendidikan dan isu dalam program MAMPU yang perlu mendapatkan dukungan dari KeMenterian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi perlu segera masuk dalam kurikum pendidikan di sekolah-sekolah negeri, swasta, termasuk yang berbasis agama.
2. Para guru perlu mendapat pendidikan seks dan kesadaran gender sebagai bekal mengajar sehingga dapat peka terhadap kendala-kendala Perempuan untuk mengakses pendidikan dan melindungi Perempuan dari stigma negative dalam mengakses pendidikan.
3. Perlunya kebijakan yang membolehkan perempuan hamil untuk terus bersekolah.
4. Dikdasmen perlu teribat dalam upaya menghapus pernikahan anak demi tercapainya wajib belajar 12 tahun.
5. Perlu adanya anggaran yang jelas untuk Pendidikan Luar Sekolah khususnya untuk pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai upaya menjangkau perempuanperempuan yang terpinggirkan dan tidak dapat menjangkau pendidikan formal.
6. Perlu revitalisasi anggaran pendidikan 20% agar bisa digunakan untuk pendidikan migrasi aman yang berbasis HAM dan gender di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah yang saat ini ada di 529 kabupaten.
7. Konten paket program keaksaraan fungsional masih didominasi oleh aspek ekonomi. Perlu memasukan konten terkait aspek kehidupan lainnya termasuk kesehatan, migrasi,

kepemimpinan, hak asasi manusia, hukum serta hal lain sesuai konteks masyarakatnya.

8. Waktu belajar KF yang hanya di batasi hingga 70 jam untuk satu paket, dengan waktu pertemuan masing-masing 2 jam per hari selama 3 bulan, tidak mampu membuat warga belajar dapat membaca dan menulis. Warga belajar khususnya perempuan membutuhkan waktu pendek untuk berkonsentrasi dan belajar dalam sehari, namun dalam periode yang panjang.
9. Perlu memberdayakan masyarakat setempat untuk menjadi tutor KF guna mengurangi ketergantungan pada sumberdaya manusia dari luar, dan menjamin kesinambungan proses belajar di masyarakat.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di tingkat kecamatan selama ini lebih banyak diakses oleh anak-anak yang putus sekolah di desa yang memiliki biaya untuk transport. Masyarakat miskin khususnya kelompok perempuan umumnya tidak dapat mengakses program di PKBM. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan khusus untuk menjangkau kelompok termiskin ini.
11. Mengembangkan sentra-sentra belajar hingga di Desa untuk keaksaraan fungsional, kejar Paket A,B,C serta pendidikan keterampilan kehidupan bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dan berkembang, serta dengan desa melalui implementasi Undang-Undang Desa.
12. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran di Malaysia dengan meningkatkan kapasitas LCC (Learning Center Community). Saat ini kapasitas LCC hanya bisa menampung 5000an anak sementara ada sekitar 50.000 anak-anak buruh migran terutama di Malaysia Timur yang tidak bersekolah.
13. Mengintegrasikan pendidikan anti trafficking dalam kurikulum sekolah. Di beberapa tempat ditemukan kasus di mana sekolah menjadi lokus dan modus perdagangan anak-anak, yang diantaranya bahkan dilakukan oleh guru-guru.
14. Perlunya kebijakan penyediaan layanan sekolah dasar (SD) di setiap desa, serta pemerataan pembangunan gedung sekolah SMP dan SMA.
15. KeMenterian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam penentuan jumlah/target penerima beasiswa siswa mikin (BSM) serta menyediakan data tentang BSM yang mudah diakses oleh masyarakat.

Tanggapan Bapak Menteri, staf ahli dan Direktur Jendral

1. Bapak Menteri sangat senang menerima MAMPU yang memiliki banyak pengalaman dan bisa sharing dengan keMenterian Pendidikan. Beberapa persoalan yang disampaikan ada yang sudah masuk daftar rencana kerja dan ada pula yang sudah ditindaklanjuti.
2. Bapak Menteri sangat setuju untuk penghapusan pernikahan dini (perkawinan anak). Pada saat ini sudah ada rencana untuk wajib belajar 12 tahun, tinggal menunggu realisiasi. Jika wajib belajar 12 tahun dapat berkontribusi untuk menghapuskan perkawinan dini, itu sangat baik agar dapat meningkatkan kualitas manusia dan generasi muda Indonesia. Tahun 2016 ada Direktorat baru di keMenterian Dikbud yaitu Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Direktorat ini fokus pada pendidikan keluarga (anak dan orang tua). Direktorat ini masih sangat baru sehingga masih perlu banyak masukan untuk pelaksanaannya. Pendidikan kesehatan reproduksi atau pendidikan seks dapat masuk kedalam direktorat baru ini.
3. Usulan agar pendidikan kesehatan reproduksi masuk kedalam kurikulum sekolah adalah baik, tapi persoalannya muatan kurikulum intra kurikuler sudah sangat padat sehingga sulit untuk memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi didalamnya. Di Indonesia ini sebenarnya banyak materi pelajaran yang seharusnya masuk kedalam non kurikuler dan ekstra kurikuler, tetapi masuk kedalam intra kurikuler, akibatnya beban murid-murid menjadi sangat berat karena mereka harus mempelajari semua materi pelajaran. Usul pak Menteri, pendidikan kesehatan reproduksi lebih tepat masuk kedalam non kurikuler dan ekstra kurikuler agar bisa lebih leluasa/ memiliki ruang untuk menjelaskan secara rinci tentang pendidikan kesehatan reproduksi dari pada di selip-selipkan kedalam mata pelajaran yang ada yang sudah sangat padat. Pak Menteri setuju jika guru-guru dan kepala sekolah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi, untuk hal ini teman-teman MAMPU dapat mendatangi sekolah-sekolah langsung dan berdiskusi dengan para guru dan kepala sekolah.
4. Menanggapi perlunya kebijakan yang membolehkan perempuan hamil untuk terus bersekolah, tahun 2016 sebelum ujian nasional untuk SMA dilaksanakan, Kemendikbud sudah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi tentang

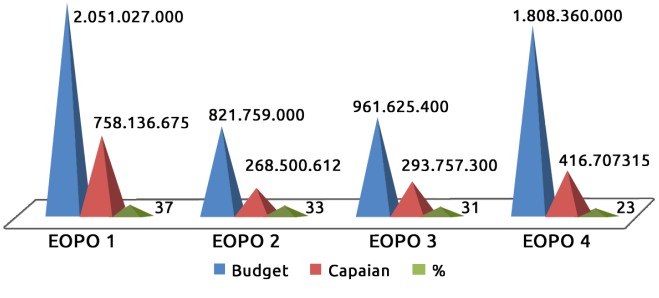
Larangan sekolah melarang murid perempuan yang hamil mengikuti ujian.

5. Tentang usulan adanya anggaran yang jelas untuk pendidikan luar sekolah, itu sudah disalurkan dananya melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di tingkat Kecamatan/ Desa dan Balai Latihan Kerja (BLK).
6. Waktu belajar Keaksaraan Fungsional (KF) saat ini dibatasi 70 jam, 2 jam sehari selama 3 bulan. jika memang masih dirasakan kurang , nanti bisa diperbaiki lagi metodenya dengan menambah panjang durasinya tetapi jam belajar perhari dikurangi
7. Tentang usulan penambahan jumlah sekolah dasar (SD) ini bisa dipertimbangkan.
8. Untuk peningkatan pengarusutmaan gender di Kemendikbud, saat ini Kemendikbud memiliki laman di website dan majalah "Sahabat Keluarga" yang mengangkat prestasi ibu-ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya sampai sekolah di perguruan tinggi, pendidikan anak-anak didalam keluarga, peran orang tua ayah dan ibu dalam pendididkan anak dll
9. Menanggapi Usulan anggaran pendidikan, Bapak Menteri menjelaskan bahwa saat ini Kemendikbud memiliki sistem informasi "Neraca Pendidikan Daerah" disingkat NPD. Tujuannya untuk melihat berapa jumlah anggaran APBD setiap kabupaten/ kota yang dialokasikan untuk pendidikan. Informasi ini dapat dilihat didalam website *www.npd.data.kemendikbud.go.id.* Didalam website tersebut dapat dilihat bahwa anggaran pendidikan dari APBN sudah cukup memenuhi tuntutan UU yakni 20%. Justru yang masih banyak kurang adalah dari dana APBD.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

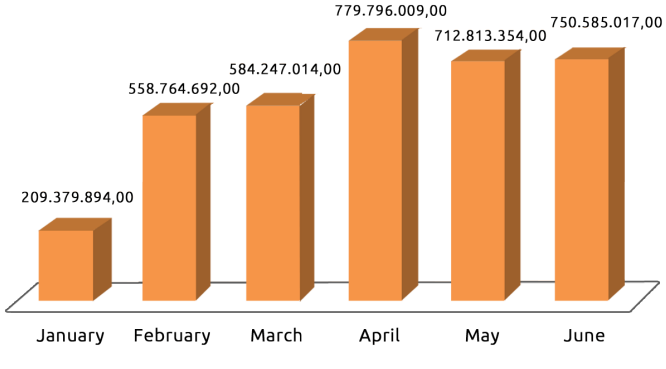
- Laporan keuangan Konsorsium PERMAMPU setiap bulan dilaporkan ke Cowater.
- Dana yang masuk untuk program HKSR PERMAMPU adalah sebesar Rp 8.275.394.066,- (program & institutional cost Rp 8.128.233.420,- dana corefund Rp 147.160.646,-.)

CAPAIAN PROGRAM PERMAMPU



- Pada bulan Januari capaian sangat rendah karena pada bulan ini pendanaan dari Cowater belum dikirim ke PERMAMPU sehingga anggota belum maksimal dalam melaksanakan rencana kerja. Dana baru dikirim pada bulan Februari 2016.

PENGELUARAN PERBULAN



Pendanaan program terbesar adalah untuk kegiatan EOPO 1, rata – rata pencapaian program masih mencapai 31%. Untuk tiga bulan ke depan diharapkan kepada anggota konsorsium untuk mengejar kegiatan yang belum terlaksana pada triwulan sebelumnya.

Serapan Dana

Serapan dana program tertinggi pada semester ini dari anggota konsorsium adalah Flower Aceh 48 %. Untuk serapan dana program PERMAMPU 37 % serapan corefund 8%. Serapan ini belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga masih perlu ditingkatkan supaya dapat terlaksana.

No	Lembaga	Budget		Realisasi		%	
		Program	Corefund	Program	Corefund	Program	Corefund
1	Flower-ACEH	1.083.625.000	210.126.200	518.529.241	21.646.455	48	10
2	PESADA-SUMUT	1.487.805.000	283.612.800	545.601.082	17.039.072	37	6
3	PPSW-Riau	949.010.400	189.640.000	342.984.900	11.047.158	36	6
4	LP2M-SUMBAR	793.300.000	156.105.000	286.529.690	20.876.870	36	13
5	APM-Jambi	872.831.000	165.000.000	325.000.020	12.995.022	37	8
6	CP WCC - Bengkulu	1.072.806.000	210.400.050	420.590.986	30.333.077	39	14
7	WCC Palembang-SUMSEL	804.160.000	149.160.050	197.637.500	6.852.000	25	5
8	DAMAR-Lampung	920.030.000	180.277.900	395.449.900	13.141.712	43	7
9	HOST (PESADA)	1.559.110.600	275.000.000	459.217.621	13.228.696	29	5
	Total/Rata2	**9.542.678.000**	**1.819.322.000**	**3.491.540.940**	**147.160.062**	**37**	**8**

Untuk pelaporan keuangan dari anggota ke *host* (PESADA) laporan *softcopy* sudah diterima setiap tanggal 1, sementara *hardcopy* diterima pada tanggal 6 setiap bulannya. Pada umumnya anggota konsorsium sudah melakukan SOP dengan baik, tetapi masih tetap ditemukan beberapa kekurangan dokumen untuk kelengkapan laporan keuangan.

Dalam hal kelengkapan dokumen pendukung Cahaya Perempuan WCC Bengkulu sangat rapi dalam melaporkan dokumen tersebut diatas. Sementara APM dan Flower Aceh masih tetap diasistensi jarak jauh melalui team viewer untuk mengecek kesalahan dalam menginput transaksi. ■

Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput



⌘ FKPAR PROVINSI ACEH

Gerakan perempuan akar rumput yang sudah bergerak satu tahun dimulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Aceh, sudah mulai melakukan pemetaan permasalahan terkait dengan isu kesehatan reproduksi, Kekerasaan Terhadap Perempuan dan perlindungan sosial bagi perempuan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan membangun jiwa kepemimpinan perempuan untuk melakukan perubahan-perubahan bentuk pemenuhan hak perempuan yang adil dan setara.



Dok. Flower Aceh

Pada tanggal 21-22 Mei 2016, FKPAR Aceh melakukan pertemuan tahunan, untuk melihat perkembangan gerakan advokasi yang sudah dilakukan di 13 kabupaten/kota. Hasil capaian yang sudah dilakukan bersama-sama diantaranya adalah pelaksanaan diskusi publik tentang HKSR, pendataan untuk perempuan miskin putus sekolah, pendataan penerima pendidikan paket A, B & C, pengurusan akte kelahiran bagi perempuan yang tidak mampu, pengurusan Ishbat nikah untuk 130 pasangan, pendataan bagi penerima kartu PKH, KPS, BPJS, dialog dengan dinas terkait tentang perlindungan sosial, dan melakukan pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan di desa. Pendampingan dalam kegiatan yang dilakukan tetap dilakukan oleh lembaga Mitra MAMPU & PEDULI di Aceh (Flower Aceh, LBH Apik Aceh, Pekka Aceh, KPI wilayah Aceh, PKBI Aceh, RPuK dan Lapesdam NU Aceh).

Selain melaporkan kegiatan dan advokasi yang dilakukan oleh jaringan FKPAR di Aceh, dalam pertemuan tahunan ini, FKPAR juga merumuskan Rencana Kerja/RK untuk periode Mei 2016 sampai dengan Mei 2017.

Rumusan RK yang sudah disusun berdasarkan hasil musyawarah diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan bagi pengurus FKPAR propinsi dan kabupaten/kota.
2. Audiensi/hearing ke instansi pemerintah fokus isu tentang kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, dan perlindungan bagi korban kekerasaan seksual.
3. Audiensi/hearing ke DPRA/K di Aceh untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi pelaksanaan qanun/kebijakan yang tidak diskriminasi terhadap perempuan.
4. Melakukan data pilah untuk data kekerasaan dan data tentang perempuan miskin.
5. Memperluas aliansi jaringan untuk mendukung gerakan perempuan akar rumput di Aceh. ■

⌘ FKPAR PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepengurusan Pelaksana FKPAR Sumut:
Ketua : Dermawati Hrp
Anggota : Sawini & Resmi Banurea

- Mengkoordinir & memastikan berjalannya RK FKPAR Sumut
- Membuat laporan capaian kegiatan
- Membuat agenda & mengundang pertemuan rutin 3 bulanan



Dok. PESADA

Kegiatan bersama yang dilaksanakan :

- Memanfaatkan moment Peringatan Hari Kebangkitan Nasional : Aksi Bersama untuk Penghapusan Kekerasan Seksual - Lawan Kekerasan Seksual : Bunyikan Genderang Perang, Medan, 21 Mei 2016

- Peringatan Hari Perempuan Internasional: Diskusi Kritis & Dialog "Membangun Kesiapan Kelompok Perempuan Akar Rumput Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) – Peluang & Ancaman" yang dilaksanakan di Medan, 8 Maret 2016
- Rapat bersama FKPAR Sumut dengan menghasilkan Rencana Kerja FKPAR Sumut 2016 sbb:
  1. Advokasi kebijakan hak – hak perempuan; dengan kegiatan berupa Audiensi dan Lobby, Rilis pernyataan sikap, Dialog interaktif di radio/TVRI serta Pertemuan dengan kaukus perempuan parlemen.
  2. Mengaktifkan kepengurusan FKPAR, dengan melakukan pembagian kerja, adanya sistem informasi dan komunikasi serta peningkatan kapasitas pengurus.
  3. Pertemuan 3 bulanan FKPAR
- Telah dimulai kegiatan iuran triwulan anggota mulai Januari 2016 sebesar Rp.100.000 yang dititip ke PESADA, dan diserahkan oleh Sawini (pengurus FKPAR). Kegunaan iuran adalah untuk mendukung komunikasi pelaksana/ pengurus FKPAR Sumut, biaya perjalanan pelaksana untuk menghadiri kegiatan, biaya snack untuk rapat – rapat/sharing cost dengan lembaga host.
- Telah ada stempel/kop surat bentuk persegi panjang, tulisan : Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera Utara. ■

⌘ FKPAR PROVINSI RIAU

Diskusi penyadaran Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) dan Gender ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota FKPAR tentang HKSR dan gender. Sehingga dapat mendukung advokasi pemenuhan HKSR dan juga menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Dok. PPSW Sumatra, Riau

Diskusi diikuti oleh Pengurus Forum Perempuan Akar Rumput Rokan Hilir (FKPAR Rohil) dan Anggota dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang dan difasilitasi oleh Koordinator Program, Juliana dan staf lapang, Tika Widya .

Beberapa pelajaran penting yang diperoleh dalam diskusi penyadaran HKSR dan gender ini, antara lain:

- Bisa mengetahui kodratnya masing-masing yang tidak bisa digantikan kemudian bisa saling bertukar pikiran antara suami dan istri untuk mengerjakan sesuatu masalah atau pekerjaan dirumah tangga.
- Saling membantu pekerjaan, agar bisa mengurangi peran ganda dalam rumah tangga sehingga bisa mengurangi beban perempuan.
- Ketidakadilan gender banyak merugikan perempuan
- Yang membedakan perempuan dan laki-laki hanyalah kodrat, sedangkan lainnya bisa dilakukan bersama-sama
- Jika sudah memahami HKSR, seks dan gender, tidak terjadi kekerasan antara suami dan istri
- Kalau sudah paham gender tidak ada lagi kekerasan, pelabelan, sub ordinasi, peminggiran dan beban ganda untuk perempuan sehingga perempuan pun lega dan aman.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah perempuan tidak akan bisa memperoleh hak-hak kesehatan reproduksi jika masih terjadi ketidakadilan gender. ■

⌘ FKPAR PROVINSI SUMBAR

Dalam rangka mendorong partisipasi perempuan akar rumput dalam pembangunan, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) bersama dengan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumbar pada tanggal 16 April 2016 menyelenggarakan kegiatan "Semiloka tentang Upaya Memperkuat Kapasitas dan Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput Dalam Pembangunan Daerah di Kota Padang".

Kegiatan yang bertempat di Aula Pertemuan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Padang dibuka oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang.

Semiloka ini menghadirkan pembicara Ketua Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) BPMPKB Kota yang menyampaikan materi "Review Implementasi

Peraturan Daerah Kota Padang No.2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan" dan Ibu Rozidateno P. Hanida Dosen Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Andalas dengan materi "Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Daerah di Kota Padang; Analisis Peluang dan Tantangannya.



Dok. LP2M

Pemerintah Kota Padang juga telah menetapkan, mensosialisasikan serta mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan. Perda tersebut membunyikan bahwa kaum perempuan boleh dan berhak untuk terlibat dalam musrenbang di daerahnya.

Ibu Rozidateno P. Hanida dalam materinya mengemukakan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan akar rumput dalam proses pembangunan daerah, antara lain:

- Identifikasi organisasi perempuan (berpihak terhadap perempuan) dan mengundang semua organisasi perempuan dalam pertemuan
- Meminta perwakilan yang seimbang perempuan dan laki-laki pada pertemuan lokal (temu warga, rapat-rapat di tingkat masyarakat)
- Meningkatkan partisipasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan serta proses penganggaran, implementasi kontrol sosial, komite pemantau.
- Memfasilitasi partisipasi perempuan yang dapat dilakukan dengan mengundang perempuan bukan suami/wakilnya dalam rapat desa, memilih jadwal/ waktu tidak bentrok dengan pekerjaan rumah tangga, tidak diwaktu malam-susah keluar rumah, tempat mudah dijangkau, dll.

Selain penyampaian materi dalam acara ini juga dilakukan identifikasi tantangan dan peluang perempuan akar rumput untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Beberapa tantangan yang berhasil disampaikan peserta adalah:

1. Kegiatan dilakukan pada malam hari sehingga menyulitkan perempuan berpartisipasi
2. Kurang percaya diri berbicara dalam forum karena belum memiliki pengetahuan tentang isu yang dibahas
3. Masih terbatasnya akses dan layanan transportasi menuju lokasi kegiatan
4. Tidak memperoleh informasi ataupun undangan
5. Sering usulan kaum perempuan terutama kegiatan non fisik tidak diterima.

Sebagai tindak lanjut hasil semiloka, FKPAR Sumbar akan berperan untuk mendorong semua pihak agar berkomitmen mengimplementasikan pengintegrasian gender dalam pembangunan daerah. ■

⌘ FKPAR PROVINSI JAMBI

Selain kegiatan bersama perayaan One Billion Raising/OBR pada bulan Februari dan perayaan Hari Perempuan Internasional pada bulan Maret, selama semester pertama di tahun 2016 ini FKPAR Propinsi Jambi juga melakukan 2 kegiatan yaitu:

A) Diskusi Rutin FKPAR Propinsi Jambi

Pertemuan rutin FKPAR Propinsi Jambi di ikuti oleh 23 orang yang berasal dari Aliansi Perempuan Merangin (APM) sebanyak 11 orang dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebanyak 12 orang. Dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2016 di Kantor KPI Wilayah Jambi dengan agenda pertemuan:

1. Review FKPAR Propinsi Jambi,
2. Sharing persiapan pertemuan Partner Forum MAMPU di Jakarta,
3. Menyusun rencana tindak lanjut FKPAR.

Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi FKPAR Propinsi Jambi selama tahun 2015 adalah:

1. Belum terjalin kerjasama yang baik dengan mitra tingkat provinsi
2. FKPAR belum menyatu (belum ada kesamaan perspektif)
3. Perlunya peningkatan kapasitas pengurus, pengawas, dan pelaksana
4. Pengurus, pengawas, dan pelaksana belum memahami visi dan misi FKPAR
5. Mobilitas serta Jarak tempuh yang jauh (6-7 jam) dari Merangin ke Propinsi Jam atau sebaliknya.

Forum juga mendiskusikan dan menyepakati RTL/ agenda bersama FKPAR Jambi untuk bulan Mei-Desember 2016 sbb :

1. Audensi Pendidikan Kejar Paket A,B,C gratis di Minggu ke 4 Mei 2016
2. Internalisasi FKPAR (Pendidikan Pengurus, Pelaksana, Pengawas) pada 1-2 Juni 2016
3. Pendataan: Paket A,B,C serta Keluarga Miskin pada Mei - Agustus 2016
4. Mengikuti Konferensi Internasional Perempuan dan Kemiskinan di Minggu pertama Agustus 2016
5. Peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasionl pada tanggal 17 Oktober 2016
6. Aksi bersama 16 HAKTP pada 25 Nov - 10 Des 2016

B) Peningkatan Kapasitas FKPAR Propinsi Jambi

FKPAR Jambi mengadakan pendidikan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pengurus, pelaksana dan pendamping FKPAR Propinsi Jambi yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 03 Juni 2016, di Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) daerah Jambi.



Dok. APM Jambi

Fasilitator dalam Kegiatan pendidikan dengan tema "Perempuan Mampu Mengatasi Kemiskinan" ini adalah team yang terdiri dari : Helfi Rahmawati (Direktur PKBI/Pengurus Permampu), Ulfa Mahfudz (Pengawas FKPAR Jambi dari KPI), dan Sualjimah (Pengawas FKPAR Jambi dari APM) dengan materi pendidikan mencakup:

1. Isu kesenjangan perempuan di forum komunitas
2. Struktur lembaga Negara tingkat Desa s/d Pusat
3. Mengenal berbagai Kebijakan untuk advokasi HKSR dan Perlindungan sosial
4. Strategi advokasi kebijakan melalui gerakan perempuan akar rumput
5. Tupoksi: Pengawas, pengurus, pelaksana dan pendamping FKPAR
6. Keterampilan berkomunikasi
7. Strategi membangun kepemimpinan perempuan untuk membuka akses dan pengurangan kemiskinan. ■

⌘ FKPAR PROVINSI BENGKULU

Perayaan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2016, Cahaya Perempuan WCC bersama FKPAR Kabupaten Rejang Lebong, Seluma dan Kota Bengkulu melakukan kegiatan aksi bersama bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota (Dinas Kesehatan) dan IBI di masing-masing wilayah program HKSR.

Kegiatan tersebut melibatkan para pihak meliputi SKPD, pemerintah kecamatan/desa/kelurahan, Perguruan Tinggi, PKK, LSM/Ormas, Todat, Toga, dan masyarakat umum, perempuan dewasa dan perempuan muda dampingan. Tema perayaan tahun ini adalah "Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan: Perempuan Bengkulu Otonom Atas Tubuhnya, Sehat & Kreatif".

Di Kabupaten Rejang Lebong perayaan Peringatan Hari Perempuan Internasional bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dan IBI serta Jhpiego. Menghadirkan anggota kelompok dampingan, 100 orang perempuan hamil, unsur pemerintahan di level kabupaten dan desa, akademisi, LSM/ornop, media, Kepolisian, perwakilan elemen masyarakat meliputi Tokoh Agama, Tokoh Adat, IBI & PKK. Output pertemuan FKPAR di Kab. Rejang Lebong adalah :

1. Launching layanan SMS Getway dan atau SMS BUNDA. ini merupakan layanan informasi Kespro bagi Ibu Hamil yang yang merupakan program Dinas Kesehatan Rejang Lebong yang bekerjasama dengan Jhpiego tahun 2016-2017;
2. Talkshow untuk percepatan penurunan AKI & AKB melalui pelayanan informasi dan penyediaan layanan Kespro yang mudah, tepat dan bermutu. Pembicara dalam talkshow adalah Wakil Bupati Rejang Lebong, Dokter Spesialis Kebidanan/SPOG, Kadis Dinkes, dan Direktur Cahaya Perempuan WCC. Host dari Jhpiego.
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Pembentukan Kepengurusan FKPAR Kab. Rejang Lebong hasilnya adalah terbentuk kepengurusan FKPAR dampingan Cahaya Perempuan WCC dan rencana kerja.
4. Pelayanan tes IVA bagi anggota kelompok dampingan di 5 Desa/Kelurahan, bekerjasama dengan IBI Kabupaten Rejang Lebong. Hasilnya adalah sebanyak 100 orang anggota FKPAR mengikuti tes IVA, ada 4 orang yang teridentifikasi positif IVA dan dirujuk ke Puskesmas Kota Curup untuk pelayanan lanjutan.

Rangkaian kegiatan Perayaan Hari Perempuan Internasional di Kota Bengkulu dihadiri oleh Wakil Walikota Bengkulu. Apresiasi dari Ibu Wakil Walikota Bengkulu atas upaya kolektif yang dilakukan oleh FKPAR Kota Bengkulu dan Cahaya Perempuan WCC untuk meminimalisir Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Bengkulu yang mencapai angka 15 kasus di tahun 2015, sehingga menempatkan Propinsi Bengkulu pada tingkat AKI tertinggi di Indonesia. Rangkaian kegiatan aksi yakni :

1. Talkshow untuk percepatan penurunan AKI & AKB melalui pelayanan informasi & penyediaan layanan kespro yang mudah, tepat dan bermutu. Pembicara dalam talkshow adalah Dokter Spesialis Kebidanan/ SPOG (Kepala Puskesmas Ratu Agung), Kepala Bidang KKIK Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan Manager Program Cahaya Perempuan WCC
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Pembentukan Kepengurusan FKPAR Kota Bengkulu. Hasilnya terpilih Pengurus dan tersusun Rencana Kerja FKPAR Kota Bengkulu tahun 2016 (dampingan Cahaya Perempuan WCC).



Dok. Cahaya Perempuan WCC

3. Pelayanan tes IVA bagi anggota kelompok dampingan di 6 Kelurahan. Hasilnya adalah sebanyak 77 anggota kelompok dampingan yang ikut pemeriksaan tes IVA, 3 orang diantaranya terindentifikasi positif IVA.

Sedangkan Perayaan Hari Perempuan Internasional di Kabupaten Seluma oleh Wakil Bupati Kabupaten Seluma yang mengapresiasi kegiatan ini untuk meminimalisir AKI di Kabupaten Seluma yang mencapai angka 5 kasus di tahun 2015 (Kabupaten tertinggi ketiga di Propinsi Bengkulu).

1. Talkshow untuk percepatan penurunan AKI & AKB melalui pelayanan informasi dan penyediaan layanan kespro yang mudah, tepat dan bermutu. Pembicara dalam talkshow adalah ketua IBI Kabupaten Seluma, Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan PP&KB Seluma dan Manager Program Cahaya Perempuan WCC.
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Pembentukan Pengurusan FKPAR Kabupaten Seluma. Hasilnya terpilih Pengurus dan tersusun RK FKPAR Kabupaten Seluma tahun 2016 (dampingan Cahaya Perempuan WCC).
3. Pelayanan tes IVA bagi anggota kelompok dampingan di 4 Desa. Hasilnya yaitu 3 orang yang dari 100 anggota kelompok dampingan yang mengikuti kegiatan dan tes IVA, terindentifikasi positif IVA & 1 orang IVA Negatif (Polip). ■

⌘ FKPAR PROVINSI SUMSEL

Kelahiran FKPAR Sumatera Selatan 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 April 2015 adalah bentuk komitmen perempuan akar rumput dampingan WCC Palembang untuk mewujudkan penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender mulai dari tingkat desa.

Oleh karena itulah, FKPAR Sumatera Selatan melakukan rapat pengurus dan evaluasi 1 tahun kelahirannya. Beberapa hal yang sudah dilakukan selama kurun waktu 1 tahun tersebut adalah terselenggaranya secara reguler diskusi kritis terkait hak-hak perempuan, terutama terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), sudah mulai melakukan pendataan kemiskinan, beberapa anggota sudah mengakses pendidikan informal (kejar paket) dan terlibat dalam kegiatan desa dan kabupaten, misalnya rapat desa dan musrenbang serta advokasi hak-hak perempuan terkait HKSR, identitas hukum, layanan kesehatan, dan lain lain.



Dok. WCC Palembang

Pada rapat pengurus dan evaluasi ini juga dilakukan diskusi kritis mengenai kemiskinan dan pemiskinan perempuan yang masih terjadi di segala tingkatan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena struktur yang tidak adil mulai dari rumah tangga hingga penyelenggara negara, kebijakan pembangunan yang sangat bias gender dan banyaknya peraturan-peraturan dan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan serta akses masyarakat (perempuan) terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk menyangkut HKSR masih sangat minim. Akibatnya masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat terbatas untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan persoalan kesehatan reproduksi yang dialaminya sendiri, keluarganya maupun perempuan di sekitarnya.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan terutama bagi perempuan, maka perempuan harus keluar dari kemiskinan dan pemiskinan yang terjadi. Untuk mewujudkan hal itu maka perempuan harus sehat, berpendidikan dan berpengetahuan serta berorganisasi. Untuk itulah rencana tindak lanjut FKPAR Sumsel di tahun berikutnya yaitu akan melakukan pembentukan FKPAR tingkat Kabupaten, melakukan peningkatan kapasitas anggota, dan tetap melakukan advokasi hak-hak perempuan, membangun jaringan dengan berbagai pihak, dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa sampai kabupaten. ■

⌘ FKPAR PROVINSI LAMPUNG

Adapun perkembangan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Lampung dapat dilihat dari beberapa capaian berikut ini:

1) Mulai terbangun kemampuan politik perempuan sehingga perempuan akar rumput aktif melaksanakan aksi bersama dengan jaringan perempuan akar rumput dan organisasi penguatan perempuan di tingkatan Lampung untuk advokasi perlindungan & pemenuhan HKSR dan hak-hak asasi perempuan dan urgent action (kegiatan incidental untuk merespon hal-hal mendesak).

Hal ini terlihat dari respon, inisiasi dan keaktifan serikat perempuan merangkul banyak pihak (PMKRI, Kopri PMII, Nahdlatul Ulama Lampung, Fatayat NU Lampung, Muslimat NU Lampung, Aisiyah Lampung, Nasiyatul Aisiyah Lampung, WKRI Lampung, PWKI Lampung, JMPPO, Majelis Budayana Indonesia, Pemuka Agama Islam, Pemuka Agama Katolik, Pemuka Agama Protestan, Pemuka Agama Hindu, Pemuka Agama Budha, dan Pemuka Agama Konghucu) untuk duduk bersama dan membicarakan beberapa hal termasuk dalam melakukan Aksi Solidaritas terhadap peristiwa kekerasan seksual yang akhir-akhir ini terjadi.

2) Serikat-serikat perempuan ini sudah memahami bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan anak semakin rentan, penting dilakukannya aksi bersama dalam upaya mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, "Lampung Butuh UU Penghapusan Kekerasan Seksual, bukan hukum kebiri, bukan hukuman mati".



Dok. DAMAR Lampung

Semakin lama pembahasan dan pengesahan RUU ini ditunda, semakin banyak lagi korban yang jatuh. Semua pihak harus berperan serta memastikan kasus ini tidak lagi berulang. Bahkan agar pembahasan dan pengesahan RUU tidak ditunda, tidak semakin banyak lagi korban yang jatuh. Serta memastikan semua pihak berperan serta memastikan kasus ini tidak lagi berulang, dilakukan doa bersama lintas iman serta penandatangan petisi yang diserahkan ke DPR RI dan Pemerintah RI

3) Terkonsolidasikannya FKPAR tingkat kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah, memiliki rencana kegiatan di semua tingkatan yang terencana dan berkesinambungan.

Melalui seminar dan musyawarah wilayah serikat perempuan 3 kabupaten/kota serta penyusunan dan pelaksanaan program kerja, pembagian peran antar tingkatan FKPAR dan pelaksanaan RK, dalam bentuk pelaksanaan perencanaan strategis.

4) Seminar dan Musyawarah Wilayah Serikat Perempuan 3 kabupaten dalam rangka memperkuat dan mengkonsolidasikan kelembagaan Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara), Serikat Perempuan Lampung selatan (Sepalas) dan Forum Advokasi Kemanusiaan Lampung tengah (FAK Lampung Tengah) merumuskan program, dan merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota masing-masing wilayah.

Tema yang diangkat dalam Muswilpun berbeda-beda, Kepal Utara dengan tema "Menggugat Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan dan pelayanan

perempuan dan Anak Korban Kekerasan". Sepalas dan FAK Lampung Tengah dengan tema "Percepatan Implementasi Standar Pelayanan Minimum Kesehatan Menuju Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Yang Cepat, Murah, Bermutu, dan Sesuai Dengan Kebutuhan.

Melalui musyawarah wilayah ini, semua pengurus di berbagai tingkatan mampu mengkonsolidasikan anggota dan memperluas wilayah kerja, sehingga perempuan tidak lagi melihat organisasi sebagai barang mewah.

Perempuan yang telah memiliki pengalaman berorganisasi di Kepal Utara, Sepalas dan FAK Lampung Tengah memiliki kesadaran kritis dan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara dalam rangka memperkuat posisi tawar perempuan, terlibat aktif dalam lingkungan sosialnya, tata pemerintahan desa, baik sebagai kepala desa maupun BPD, dan pemerintahan kabupaten.

Hasil dari pelaksanaan Muswil ini terkonsolidasikan Serikat perempuan tingkat kabupaten, pertanggung Jawaban Ketua serikat sebelumnya, terumuskannya perencanaan program dan rekomendasi, pemilihan ketua, serta menguatnya perspektif mengenai Hak Kesehatan Reproduksi.

5) Perempuan akar rumput memiliki kelompok ekonomi dan usaha produktif yang mandiri dan berkelanjutan yang merupakan salah satu fondasi penguatan ekonomi telah semakin berkembang. Terbangun budaya menabung di kalangan perempuan dan menggunakannya untuk pengembangan usaha produktif.

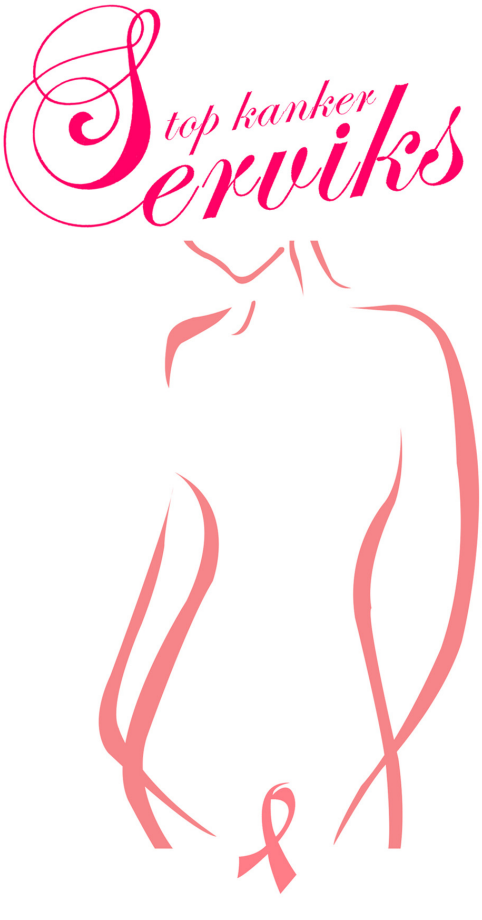
Hal ini dapat terlihat dari penambahan jumlah kelompok simpan perempuan pada periode ini menjadi 13 kelompok, dengan jumlah tabungan sebesar Rp. 84.636.100. pada periode 3 bulan sebelumnya baru 8 kelompok, dengan jumlah tabungan Rp. 68.009.000.

6) Kepal Utara juga berani dan aktif melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan HKSR perempuan di komunitasnya, ke Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta ke pemerintah khususnya untuk mendorong terbentuknya Forum Multi Stakeholder untuk pemenuhan perlindungan dan pelayanan perempuan korban kekerasan di Lampung Utara

7) FAKTA Tanggamus, Perempuan Timur, Sepalas, Kepal Utara sudah memfungsikan diri sebagai pusat layanan berbasis komunitas

8) Kader Kepal Utara didaulat menjadi Kader MOP oleh Badan PPKB Kabupaten Lampung Utara. ■





Forum Multi stakeholder



⌘ FMS ACEH

Forum Multi Stakeholder (FMS) rutin dilaksanakan secara regular setiap 2 bulan sekali dengan melibatkan pemangku kebijakan di institusi Pemerintah meliputi Bappeda, Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan dan Perempuan dan Keluarga Berencana/nama yang setara, Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), BPJS, Puskesmas dan Camat di wilayah kerja Flower Aceh, perwakilan Tokoh Adat, tokoh Agama, akademisi, Ornop/LSM, media, serta anggota legislatif perempuan.



Dok. Flower Aceh

Forum ini menjadi wadah untuk berkoordinasi, berbagi pengalaman, bahkan bersinergis dan kerjasama tentang isu dan kegiatan yang mendukung pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan di tingkat desa dan Kota/Kabupaten. Lebih lanjut, forum ini juga mulai melakukan advokasi bersama untuk pemenuhan HKSR di masing-masing wilayah.

Di Pidie FMS sepakat untuk bersama-sama memastikan untuk optimalisasi peran P2TP2A yang selama ini melemah akibat keterbatasan SDM dan alokasi anggaran, lebih lanjut untuk juga akan mendorong untuk dibuatkannya pos-pos pengaduan kasus-kasus KTP di tingkat desa. Forum ini juga dirasakan menjadi ajang untuk berbagi informasi dan belajar bersama.

Pelaksanaan FMS di tingkat desa di Aceh Utara mendiskusikan tentang perencanaan desa (RPJM Gampong) agar memuat usulan dana tambahan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perempuan dan HKSR. Diantarannya dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk penambahan gizi ibu hamil, posyandu yang edukatif, serta program-program yang mendukung penguatan ekonomi perempuan miskin. Sedangkan FMS tingkat desa di Banda Aceh mulai mendiskusikan tentang standar layanan bidang kesehatan di tingkat kecamatan dan pelibatan unsur-unsur masyarakat selain perangkat desa dan perangkat kecamatan agar gerakan untuk mendorong peningkatan layanan bidang kesehatan khususnya kesehatan reproduksi bisa lebih masif lagi.

Di kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh, isu kepemilikan kartu BPJS Kesehatan masih menjadi perhatian utama. Sekitar 30 persen penduduk di kecamatan Meuraxa belum memiliki kartu BPJS Kesehatan padahal kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki masyarakat merupakan faktor utama agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan baik layanan kuratif, preventif maupun promotif. Oleh karena itu FMS kecamatan Meuraxa bersama forum kesehatan masyarakat kecamatan Meuraxa akan melakukan audiensi dengan BPJS.

"Masih banyak ibu-ibu dan anak-anak di desa kami tidak bisa mendapatkan layanan di Posyandu karena belum memiliki kartu BPJS kesehatan" ujar Geuchik (Sebutan Kepala Desa) Punge Jurong. ■

⌘ FMS SUMATERA UTARA

Kegiatan yang dilakukan Forum Multi Stakeholder bersama Pesada antara lain:

1. Kegiatan Peringatan Hari Anti Kekerasan Seksual: Diskusi & kampanye Stop Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan, dilakukan dengan menari bersama OBR pada tanggal 14 Februari 2016 di Stabat – Langkat. Adapun peserta yang hadir sejumlah 39 perempuan dan 22 laki-laki



Dok. PESADA

2. Pelaksanaan kegiatan diskusi dan pemeriksaan IVA kerjasama FMS Langkat dan Puskesmas Kecamatan Padang Tualang – Langkat dalam rangka International Women Day (10 Maret 2016). Peserta yang hadir adalah 40 orang perempuan
3. Pengenalan PP. 61 untuk Tokoh Agama Kristen yang diselenggarakan oleh Pesada Pakpak Bharat di Pakpak Bharat pada tanggal 12 Februari 2016
4. Penyadaran gender untuk suami dan aparat desa di Desa Sisobahili dan Hiliwaele Kecamatan Moro'o Nias Barat difasilitasi oleh FMS Fomahaga Nias Barat dan Pesada
5. Pertemuan anggota Forum Multi Stakeholder Pesada tingkat Sumatera Utara yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 17-19 Mei 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi FMS bersama Pesada dalam advokasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi perempuan dan untuk lebih menegaskan konsentrasi FMS ke depan. ■

⌘ FMS RIAU

Persoalan HKSR masih menjadi isu strategis dan perlu mendapat perhatian serta dukungan dari berbagai pihak. PPSW Sumatra yang tergabung di dalam Konsorsium Permampu melakukan berbagai strategi dalam melakukan kerja-kerja advokasi dimana strategi advokasi akan ditujukan kepada pemerintah, para tokoh/pemuka agama dan adat di lokasi program, para penyedia layanan, sekolah lanjutan atas serta para pihak lainnya. Para pihak tentunya memerlukan ruang untuk bertemu, bicara dan bergerak melakukan perubahan khususnya dalam pemenuhan HKSR. Untuk itu perlu di bentuk Forum Multistakeholder di wilayah Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Pada 19 Mei 2016 bertempat di hotel Ameera Pekanbaru, 33 orang yang merupakan multi stakeholder se-Kota Pekanbaru, hadir dan menjadi inisiator pembentukan FMS Peduli HKSR Kota Pekanbaru. unsur-unsur yang hadir diantaranya Dinas Kesehatan, BPPMKB, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kesbangpol, Kemenag, Dinas Sosial, Ikatan Guru RA, Tokoh Masyarakat, Aisyiah, GOW, RUPARI, HWDI, P2TP2A, Pihak Kecamatan dan Kelurahan, PKBI Riau, FKPAR Pekanbaru. Wakil Walikota Pekanbaru, Bapak Ayat Cahyadi, S.Si, berkesempatan hadir dan membuka acara.

Agenda pembentukan FMS dirangkai dengan kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan mengangkat Tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Dimana saat ini publik dikejutkan dengan adanya Kasus Yuyun (YY) perempuan muda Rejang Lebong Bengkulu yang meninggal karena mengalami perkosaan dan pembunuhan oleh 14 orang laki-laki. Forum sepakat merumuskan visi dan misi. Dimana Visi FMS Peduli HKSR Kota Pekanbaru adalah menjadikan masyarakat kota Pekanbaru yang sehat, cerdas dan berkualitas, serta Misi (1) Meningkatkan kemandirian



Dok. PPSW Sumatra, Riau

ekonomi, pendidikan, pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kota Pekanbaru (2) Memperkuat peran dan kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan terutama yang terkait akan HKSR (3) Mengembangkan wadah organisasi perempuan sebagai tempat bertukar informasi tentang HKSR.

Terpilih sebagai ketua Ibu Hj. Astra Mulberiyani, SP (P2TP2A Kota Pekanbaru) dan forum memutuskan menetapkan 4 bidang kerja yaitu Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM, Bidang Pemberdayaan, Ekonomi, Kerjasama dan Kemitraan, Bidang Advokasi dan Pendampingan serta Bidang Fasilitasi Kesehatan Reproduksi. Pengurus bersepakat untuk melakukan rapat perdana pada 27 Mei 2016 di Kompleks Perkantoran Mesjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman Pekanbaru. Pertemuan yang fasilitasi oleh PPSW Sumatra dan pengurus terpilih diikuti oleh semua pengurus Forum Multistakeholder peduli HKSR kota Pekanbaru. Agenda pertemuan adalah membahas RTL Forum dan penetapan tugas masing-masing jabatan. ■

⌘ FMS SUMATERA BARAT

Audiensi ini diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2016 di Ruang Rapat DPRD Kota Padang dengan tujuan untuk memberikan usulan kegiatan dalam upaya mendukung pemenuhan HKSR yang akan diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Kota Padang Tahun 2016 untuk

tahun anggaran 2017. Audiensi ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang yang dalam pernyataannya berkomitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan diajukan.

Beberapa usulan kegiatan yang disepakati forum, adalah:

1. Pelatihan keterampilan (vokasional) kepada perempuan yang berasal dari ekonomi rendah (mengacu pada PPLS)
2. Pembentukan sanggar kreatif untuk generasi muda di tingkat kelurahan
3. Pemberian makanan tambahan siswa SD pada sekolah dengan status gizi rendah
4. Kampanye gerakan pangan lokal di tingkat kota (agenda tahunan)
5. Pendidikan/ pelatihan tentang kesehatan reproduksi bagi generasi muda di Kota Padang
6. Pendidikan/ pelatihan tentang kesehatan reproduksi bagi tokoh masyarakat di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan
7. Program SMS Gateway tentang layanan dan informasi kesehatan reproduksi.



Dok. LP2M

Dalam pertemuan ini juga disepakati tim penyusun draft Peraturan Walikota (Perwako) untuk mendukung Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak. Draft Perwako ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi pada tahun 2015 lalu. ■

⌘ FMS JAMBI

Anggota Forum Multi Stakeholders dari dinas/ instansi terkait belum memiliki keberpihakan terhadap persoalan HKSR seperti yang diharapkan. APM kemudian melibatkan anggota FMS lainya yang sudah memiliki keberpihakan seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama, forum suami/ayah dan perwakilan kelompok perempuan untuk melakukan koordinasi kepada pimpinan dinas/instansi terkait, Camat, perempuan pejabat publik dan DPRD.

Pendekatan lain yang digunakan adalah dengan



Dok. APM Jambi

menyertakan beberapa anggota forum dalam pelatihan penyadaran HKSR. Anggota forum ini berasal dari lembaga pengada layanan kesehatan seperti Rumah sakit, IBI, IDI, Para bidan dan staf PKM dari 7 Kecamatan. Dalam waktu dekat APM juga akan mengadakan lokalatih tentang penyadaran gender dan HKSR khusus untuk FMS sehingga diharapkan anggota forum memiliki tanggungjawab atas persoalan – persoalan HKSR di Kabupaten Merangin.

Pada bulan Juni ini APM berhasil mengadvoksi Pemda Kabupaten Merangin untuk membiayai pemulangan Jenazah Ibu Bekti, seorang TKI ilegal dari Merangin yang meninggal dunia di Malaysia karena sakit kanker payudara. Ibu Bekti merupakan dampingan APM dan migrantcare. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama dengan KBRI di Malaysia. ■

⌘ FMS BENGKULU

Forum Multi Stakeholder (FMS) dalam periode Januari – Juni 2016 di dua wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu telah melakukan pertemuan periodik untuk memperkuat program kepemimpinan perempuan untuk mencapai kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi yang lebih baik. Sedangkan di wilayah pengembangan program Kabupaten Seluma baru dilakukan pertemuan pada 13 April 2016.

Undangan pertemuan periodik FMS di dua Kabupaten/Kota (Kota Bengkulu dan Kab. Rejang Lebong) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Pertemuan FMS di Kota

Bengkulu yang dilaksanakan di ruang pertemuan di kantor Walikota Bengkulu oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Wakil Walikota menghadiri dan menjadi peserta diskusi aktif selama proses diskusi berlangsung. Diskusi kritis FMS dalam rangka mengatasi Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Bengkulu (tertinggi di propinsi Bengkulu). Kesepakatan forum adalah :

1. Penanganan AKI harus jadi gerakan sosial.
2. Koordinator FMS tetap Wakil Walikota Bengkulu
3. Perlu melakukan sinkronisasi data FKPAR dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.
4. Harus ada audit data pada kasus AKI untuk memastikan validitas data dan latarbelakang kasus.



Dok. Cahaya Perempuan WCC

Pertemuan FMS di Kabupaten Rejang Lebong membahas optimalisasi pelaksanaan PERDA no. 4 tahun 2015 tentang Penghapusan Kekerasan Perempuan dan Anak (KtPA). Pasca kasus Yy, diperoleh pembelajaran bahwa komponen yang terikat dalam Perda tersebut selama ini belum bergerak aktif sehingga kasus-kasus KtPA terutama kekerasan seksual terhadap anak perempuan dengan pelaku berkelompok marak terjadi.

Disadari bahwa sistem kontrol sosial di masyarakat harus ditingkatkan; peran tokoh agama dan tokoh adat untuk perlindungan perempuan dari pelanggaran kasus HKSR di masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat/komunitas adat tertentu yang cenderung berperilaku kekerasan di Rejang Lebong. Keaktifan P2TP2A tidak terlepas dari dukungan anggaran yang jelas dan tetap dari APBD Kab. Rejang Lebong.

Pemda Rejang Lebong melalui Dinas Kesehatan telah meluncurkan program SMS Getway yang diberi nama "SMS Bunda" untuk pelayanan informasi Kespro bagi ibu hamil. Tujuan program percontohan ini untuk pendidikan dan penyadaran mengenai kesehatan ibu dan bayi sejak fase hamil sampai fase anak berusia 2 tahun (seribu hari pertama kehidupan).

Cahaya Perempuan WCC melihat bahwa program percontohan ini penting dikembangkan ke daerah lain dengan dukungan kebijakan program dan anggaran yang tetap sebagai salah satu upaya menurunkan AKI di Kab. Rejang Lebong. Atas dasar itu, Cahaya Perempuan WCC memasukan masalah ini ke dalam agenda pembahasan di FMS Rejang Lebong dan memastikan respon dari DPRD Rejang Lebong (bagian Banggar) untuk merealisasikan kebijakan anggaran daerah untuk penurunan AKI.

Kabupaten Seluma sebagai wilayah baru program HKSR tahun 2016, telah melaksanakan pertemuan FMS di Kabupaten Seluma. Pertemuan difasilitasi oleh Cahaya Perempuan WCC dilakukan di ruang pertemuan Hotel Arnanda Tais dihadiri oleh SKPD terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, FKPAR, PKBI, dan APH. Pertemuan pertama ini lebih membahas tentang program HKSR dan perubahan-perubahan yang akan dicapai dalam 4 tahun ke depan yang melibatkan para pihak yang hadir dan dukungan kebijakan daerah Kab. Seluma. Wakil Bupati Seluma dalam pertemuan itu berpendapat tentang keberadaan program HKSR dan Forum Multi Stakeholder.

"Program HKSR yang sedang dilaksanakan di Seluma ini akan menjadi program Pemerintah Daerah terkhusus untuk penanggulangan AKI & AKB serta kekerasan terhadap Perempuan/anak, leading sektor adalah Dinas Kesehatan. Forum Multi Stakeholder seperti ini sangat penting sebagai wadah untuk berdiskusi lintas sektor, sebagai pengikatnya atau landasan legalitas formal keberadaan FMS, bisa SK Bupati atau SK Kepala Dinas Kesehatan sesuai kesepakatan anggota forum" ujar Wakil Bupati Seluma. ■

⌘ FMS PALEMBANG

Sejak terbentuk pada pertengahan bulan November 2016 yang lalu, Forum Multi Stakeholder /FMS Kabupaten OKI Sumatera Selatan telah beberapa kali mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengurus dan anggotanya. Beberapa pelatihan yang sudah dilakukan WCC Palembang bagi FMS OKI diantaranya adalah Pelatihan Kesadaran Gender, peningkatan pengetahuan dan pengenalan tentang Hak-hak Perempuan dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) serta Pelatihan Advokasi dan Pencatatan/Pendataan Kasus HKSR. Selain pelatihan, juga dilakukan diskusi kritis mengenai PP No. 61 tahun 2014 dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya Kekerasan Seksual.



Dok. WCC Palembang

Beberapa rencana kerja FMS Kabupaten OKI setelah mendapatkan peningkatan kapasitas yaitu sosialisasi hak-hak perempuan termasuk HKSR ke lembaga masing-masing anggota dan forum-forum dimana anggota FMS terlibat didalamnya, misalnya Tokoh Agama menyampaikan pada saat ceramah yang dilakukannya atau Tokoh Adat menyampaikan persoalan HKSR ini pada saat pertemuan adat. Selain itu juga, anggota forum diharapkan mulai melakukan identifikasi dan melakukan pendataan persoalan HKSR yang melapor atau ditemukan di Kabupaten OKI sesuai dengan format pendataan yang sudah dibuat bersama-sama anggota FMS Kabupaten OKI. ■

⌘ FMS LAMPUNG

Perkembangan FMS sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan HKSR meningkat pesat. Hal ini ditandai dengan semakin tumbuhnya kesadaran akan upaya promosi dan pemenuhan HKSR diberbagai daerah. Berikut perkembangan FMS di beberapa daerah:

Kabupaten Lampung Tengah

Dengan mengambil nama FMS Promosi, Pemenuhan, dan Penegakkan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi, forum ini telah memiliki Rencana Aksi yang berisi pembagian peran dari anggota forum, yang terdiri atas: DPRD, Badan Perencana, BPS, Biro/ Badan/Bagian PP, Perguruan Tinggi, Departemen Agama, serta semua sub-dinas di lingkungan Dinas dan Organisasi Masyarakat Sipil yang menangani kesehatan, khususnya kesehatan seksual dan reproduksi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain pembagian tugas dan tanggung jawab dari anggota forum, di draft desain FMS juga tertuang program yang akan diusung oleh forum diantaranya Peningkatan Kapasitas (Capacity Building), Penguatan Stakeholders Kesehatan, Penguatan Database KSR serta Perluasan Informasi dengan membuat sejumlah media dan sarana penunjang komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan melalui multi-media cetak maupun elektronik. Forum Multi Stakeholder Promosi, Pemenuhan, dan Penegakkan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Pendidikan Kabupaten ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayahnya.

Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan beberapa kali pertemuan, didapatlah informasi terkait pelaksanaan pelayanan yang ada di lembaga penyedia layanan di Lampung Utara. Namun dalam pelaksanaannya sering kali terkendala pada anggaran dan pencatatan kasus yang ditangani. Hal ini berimbas sehingga laporan yang dibuat nihil. Untuk itu masih perlu pertemuan lanjutan untuk penguatan kapasitas mengenai layanan penanganan kasus dan pencatatan.

Untuk anggaran, FMS Lampung Utara sedang memetakan kebijakan dan pembiayaan seperti apa dan bagaimana alokasinya. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan dengan pembuatan kertas posisi yang dapat menggambarkan potret perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara. Dibutuhkan pula data yang mampu menggambarkan keadaan dari masyarakat beserta analisis kebutuhan dan kendala. Hal ini yang akan diperlukan guna pendekatan dalam melakukan audiensi dengan legislatif.

FMS Bandar Lampung

FMS di Bandar Lampung fokus dalam pencatatan kasus. Setelah beberapa kali pertemuan, forum sepakat akan melakukan ujicoba format form pencatatan yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya forum kembali akan mengagendakan pertemuan setelah lebaran untuk menyampaikan final format, asistensi pengisian dan sosialisasi. Untuk uji coba sendiri, forum telah sepakat dilakukan per 3 bulan. Tahap pertama akan di ujicobakan ke 7 puskesmas yang telah dipilih.



Dok. DAMAR Lampung

Selain itu forum akan melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung agar mengeluarkan semacam surat edaran yang menyatakan bahwa Form Pencatatan ini penting untuk dilakukan di Puskesmas.

Salah satu hal yang menunjukan kepedulian negara terhadap HKSR adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman No. 800/875E/III.21/2016 antara Kepala BKKB & PP Kota Bandar Lampung dengan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dimana beberapa lingkup kerjasama diantaranya adalah:

1. Pendidikan dan penyadaran gender dan HKSR bagi keluarga ditingkat kelurahan
2. Penyelenggaraan layanan deteksi kanker servik dengan metode IVA bagi perempuan miskin perkotaan
3. Pelayanan informasi yang menyeluruh dan akses alat kontrasepsi; informasi tentang dampak pemakaian alkon ke tubuh perempuan
4. Penyuluhan mengenai kekerasan terhadap perempuan (perkosaan, incest dan KDRT) yang berdampak pada KtD dan IMS
5. Mengembangkan rujukan layanan ke lembaga lain terkait dengan kebutuhan pelayanan Kespro. ■

Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mencapai kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi yang lebih baik

PERMAMPU

PROGRAM	MEMPERKUAT KEPEMIMPINAN PEREMPUAN UNTUK MENCAPAI KESEHATAN IBU DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG LEBIH BAIK
TUJUAN	Meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas layanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan, dan mengubah pendekatan, dari pendekatan berbasis kewajiban negara kepada pendekatan berbasis hak perempuan
STRATEGI	a) Mengadvokasi perubahan persepsi dan paradigma pemerintah, pemimpin setempat dan media dari "mengontrol tubuh perempuan dan peranan reproduksi fisik perempuan" menjadi penghargaan pemenuhan dan perlindungan HKSR Perempuan b) Menguatkan organisasi perempuan akar rumput dan pemimpin perempuan untuk berpartisipasi aktif dan mengontrol kebijakan dan peraturan setempat terkait HKSR Perempuan
AREA KERJA	Di **8 propinsi** dan **43 kabupaten/kota** yang meliputi; **Aceh** (Aceh Barat, Aceh Besar, Bireun, Aceh Jaya, Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Pidie), **Sumatera Utara** (Dairi, Nias Selatan, Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Langkat, Kota Medan, Nias, Nias Barat, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah), **Riau** (Rokan Hilir), **Sumatera Barat** (Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawahlunto, Tanah Datar), **Jambi** (Merangin), **Bengkulu** (Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Muko-muko, Rejang Lebong), **Sumatera Selatan** (Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang), **Lampung** (Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus).
ORGANISASI PELAKSANA DI TINGKAT WILAYAH	• Flower Aceh • PESADA • Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Sumatera • Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Padang • Aliansi Perempuan Merangin (APM) Jambi • Women Crisis Center Cahaya Perempuan Bengkulu • Women Crisis Center Palembang • Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung
CONTOH KEGIATAN	• Pengorganisasian perempuan melalui pendampingan kelompok ekonomi (CU, Koperasi, Simpan Pinjam), Forum Perempuan Muda dan Aksi Kolektif Forum Komunitas Akar Rumput (FKPAR); serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis mengenai HKSR • Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan atas HKSR perempuan melalui forum diskusi kritis yang dilaksanakan secara reguler untuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga penyedia layanan kesehatan, pengacara dan media


CERITA
PERUBAHAN

Perempuan Harus Sehat dan Berpengetahuan

Ibu Sutarmi yang lebih akrab di sapa Ibu Emmy adalah seorang *single parent* yang menghidupi ketiga orang anak-anaknya. Ibu Emmy sangat aktif mengikuti kegiatan di Kelurahan Pahlawan Palembang, diantaranya kegiatan yang dilakukan oleh Dinsos, BNN dan Tim PKK. Sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu Ibu Emmy menjadi CO (Community Organizer) WCC Palembang dan bergabung dengan kelompok dampingan WCC Palembang Jaya Bersama.

> *Untuk bisa maju dan membantu perempuan lain, perempuan harus sehat, berpengetahuan dan gaul.*

Ibu Emmy merasa bersyukur bisa bertemu dengan WCC Palembang dan bergabung dalam kelompok dampingan WCC Palembang, karena menurutnya banyak hal yang ia dapatkan baik berupa pengetahuan, keahlian dan jaringan. Ibu Emmy merasakan perbedaan kualitas pengetahuan yang dia dapatkan, bahkan ia mendapatkan keahlian mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang kerap dia temukan dilingkungan tempat tinggalnya.

Selain itu pertemanan yang dia dapatkan dalam kelompok pertemanan yang berlandaskan pada saling berbagi dan saling mendukung untuk kemajuan bersama. Ibu Emmy baru menyadari ketika beberapa kali mengikuti diskusi kritis didalam kelompok, ternyata perempuan membutuhkan kebutuhan khusus karena memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki namun disisi lain perempuan juga harus mendapat keadilan dan kesetaraan didalam kehidupan sehari-hari.



Perempuan memiliki hak-hak yang seharusnya dilindungi namun sering kali perempuan sendiri belum memiliki kesadaran akan hak-haknya, terutama tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang selama ini sering diabaikan bahkan oleh perempuan baik itu sendiri. Pentingnya membangun kesadaran tentang kesetaraan gender, pemahaman lebih mendalam tentang KDRT (Kekerasan Dalam RumahTangga).

Bagi ibu Emmy, untuk bisa maju dan membantu perempuan lain, perempuan harus sehat dan berpengetahuan serta gaul. Salah satu cara agar kita bisa bergaul, kita harus berorganisasi atau berkelompok. Karena dengan berkelompok, kita akan bertemu dengan banyak orang, mendapatkan pengetahuan dari berbagai pihak serta dapat memupuk solidaritas, terutama solidaritas sesama perempuan. ■

Perempuan harus paham Hak-haknya

Perempuan harus berubah agar dapat memperjuangkan hak-haknya. Perubahan ini mencakup meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga perempuan menjadi sadar dan mengerti bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi baik oleh suami, keluarga, masyarakat sekitar dan pemerintah.

Salah satu perempuan yang menunjukkan semangat perubahan tersebut adalah Marsusi Luthfi. Kelahiran Lubuk Tanah 34 tahun lalu, perempuan yang akrab dipanggil Susi ini, merupakan salah satu pejabat di Pemerintahan Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Padang Pariaman. Ia telah mengabdi sebagai staf di Pemerintahan Nagari hampir 13 tahun. Berbagai jabatan pernah dilaluinya. Saat ini Susi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan. Ia juga ketua Jaringan Perempuan Usaha Kecil HIPPMA Padang Pariaman.

Menurut Susi pendidikan formal memang penting untuk mendapat ilmu pengetahuan. Tetapi pendidikan informal seperti pelatihan, sosialisasi dan sekolah informal --seperti yang dilakukan oleh LP2M-- tidak kalah penting untuk memperluas cakrawala berfikir dan melakukan pengabdian kepada masyarakat pada umumnya, dan perempuan pada khususnya.

Khususnya pengetahuan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi, dimana hal ini masih dianggap sangat tabu di lingkungan masyarakat sekitar. Tidak banyak orang tahu dan paham tentang HKSR, apalagi kaum perempuan. "Padahal perempuan harus lebih paham tentang HKSR. Ketidakadilan dan kekerasan banyak dialami oleh perempuan, baik di ranah domestik maupun melalui kebijakan dan pelayanan yang tidak sepenuhnya membela hak-hak perempuan", ujar Susi.

Dalam upaya menyebarluaskan informasi ini, Ia lakukan dengan berbagai cara. Baik melalui kelompok atau organisasi yang ada di Nagari, seperti kelompok perempuan usaha kecil, PKK dan Majelis Taklim, sampai dengan melibatkan dokter atau bidan yang tinggal lingkungan tempat tinggalnya.



Tahun 2014 kemarin, Negara mengeluarkan kebijakan tentang tentang Pembangunan Desa melalui UU Nomor 6 Tahun 2014. Dengan UU ini kesempatan bagi perempuan untuk mendorong pemerintah daerah atau, di tingkat pemerintah nagari, untuk melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan yang memprioritaskan pemenuhan hak perempuan termasuk HKSR menjadi lebih terbuka luas. Kesempatan ini bukanlah hal yang mudah karena budaya patriarki yang masih sangat kental didalam perencanaan dan pembangunan terutama di tingkat nagari. Namun momentum ini dimanfaatkan Susi dan kawan-kawan perempuan lainnya untuk terlibat dalam Musrenbang Nagari. Hasilnya, pada Maret tahun 2016 kemarin, pertama kalinya dalam sejarah Nagari Koto Tinggi, kuota perempuan sebagai peserta dalam agenda Musrenbang tersebut dihadiri hampir setengah dari jumlah keseluruhan.

Susi sebagai salah satu penggerak mendorong perempuan di nagarinya mengusulkan prioritas-prioritas program yang lebih memihak pada kepentingan perempuan dan kelompok rentan. Mereka berhasil memasukkan 14 program prioritas pembangunan nagari yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.

Perjuangan tidak selesai sampai situ. Pengawalan serta keterlibatan dalam mendorong implementasi serta kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak perempuan baru akan dimulai. Bagi Susi, pengetahuan dan informasi harus terus digali dan diasah serta disebarluaskan kepada perempuan lainnya. "Agar seluruh perempuan dapat lebih berdaya dan terpenuhi hak-haknya", pungkas Susi. ■

Liputan Media PERMAMPU

⌘ Penyadaran Hak-hak Perempuan untuk Perempuan Muda

Flower Aceh menyelenggarakan pelatihan hak-hak perempuan untuk 25 orang perempuan remaja dari Gampong Blang Ara dan Gampong Buket Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja perempuan tentang hak-hak perempuan yang telah dijamin dalam kebijakan-kebijakan di Aceh, hukum di level nasional dan konvensi-konvensi di tingkat internasional.

Selanjutnya di:
http://www.lintasnasional.com/2015/08/15/flower-aceh-gelar-pelatihan-dasar-hak-hak-perempuan/

⌘ Hari Peringatan Perempuan Sedunia Sebagai Wadah Kampanye

Hari Peringatan Perempuan Sedunia dapat menjadi wadah kampanye bagi seluruh perempuan yang ada di Aceh agar mampu menjadi kuat secara ekonomi, politik dan sosial.

Selanjutnya di:
http://habadaily.com/news/6049/jeritan-hati-flower-aceh-melihat-kondisi-perempuan.html

⌘ Aksi Solidaritas PERMAMPU

Konsorsium PERMAMPU yang tergabung dalam Aksi Solidaritas untuk Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Save Our Sisters – Nyalakan Cahaya untuk Yuyun menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu.

Selanjutnya di:
http://www.kanalaceh.com/2016/05/04/save-our-sisters-nyalakan-cahaya-untuk-yuyun/

⌘ Aksi Damai "Stop Kekerasan Terhadap Perempuan" di Depan Kantor Bupati Nias Barat

Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi belakangan ini mengundang simpati organisasi perempuan yang tergabung dalam Pesada, CU PFPN, dan FMS Famohaga Nias Barat. Sebagai bentuk keprihatinan, mereka melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Nias Barat.

Selanjutnya di:
http://www.suaranias.com/peristiwa/aksi-damai-stop-kekerasan-terhadap-perempuan-di-depan-kantor-bupati-nias-barat/

⌘ My Body My Revolution

One Billion Rising (OBR) merupakan salah satu cara untuk menolak dan perlawanan terhadap kekerasan terhadap wanita. OBR dengan tema 'My Body My Revolution' ini merupakan kampanye untuk menuntut, mengajak, menyadarkan, dan menggabungkan orang-orang di seluruh dunia untuk bersama-sama menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya di:
http://beritapagi.co.id/2016/02/15/lawan-kekerasan-dengan-obr.html

⌘ Perempuan Jadi Titik Utama Pembangunan

Perempuan Sumatera Mampu (Permampu) merayakan Hari Perempuan Internasional dengan tema 'Perempuan Melawan Ketimpangan'. Pengambilan tema didasarkan atas pengalaman lapang dan analisis Permampu atas penelitian kualitatif yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan menjadi titik utama mencapai pembangunan berkelanjutan dan berhubungan erat dengan ketimpangan.



Selanjutnya di:
http://beritapagi.co.id/2016/03/10/perempuan-jadi-titik-utama-pembangunan.html

⌘ Dampak Internet dan Smart Phone pada Meningkatnya Permasalahan Seksual

Woman Crisis Center (WCC) Palembangmenilai pengaruh negatif penggunaan internet dan smarpthone membuat berkurangnya rasa perhatian antara anggota keluarga. Pada dasarnya penggunan smarphone pada anak anak harus dibatasi dan diawasi orang tua, atau sebaliknya orang tua tidak memberikan sama sekali jika anak belum cukup umur.

Selanjutnya di:
http://www.kaganga.com/lifestyle/view/berkurangnya-rasa-perhatian-antara-anggota-keluarga.html

⌘ Kebijakan Anti Kekerasan Seksual Kepada Perempuan dan Anak

Angka kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan kenaikan dalam 5 tahun terakhir dan bahkan memunculkan tren baru berupa pemerkosaan secara beramai-ramai yang menimpa anak-anak. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi pemerintah melalui penerapan kebijakan anti kekerasan seksual kepada perempuan dan anak.

Selanjutnya di:

http://rri.co.id/post/berita/273060/nasional/tren_kekerasan_seksual_terhadap_perempuan_dan_anak.html

⌘ Mayoritas Pengaduan Ke WCC Kasus KDRT Dan Pelecehan Kepada Wanita

Kasus kekerasan dan hukum terhadap wanita setiap tahun terus mengalami peningakatan. Berdasarkan data dari Women Crisis Centre Palembang, sepanjang tahun 2015 kekesarasan terhadap wanita mencapai 261 kasus yang diterima oleh WCC Palembang dan sampai bulan Maret tahun 2016 baru mencapai 52 kasus.

Selanjutnya di:

http://www.sriwijayatv.com/read/11499/mayoritas-pengaduan-ke-wcc-kasus-kdrt-dan-pelecehan-kepada-wanita.html

⌘ Stop Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Selama tahun 2016 WCC berupaya membangun kesadaran para remaja melalui kegiatan "Stop Kekerasan dan Pelecehan Seksual." Kegiatan ini digalakkan ke sekolah-sekolah dan kampus perguruan tinggi yang ada di 17 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya di:

http://www.harianbernas.com/berita-15552-Aktivis-WCC-Ajak-Pelajar-dan-Mahasiswa-Lawan-Kekerasan-Seksual-.html

⌘ RUU Kekerasan Seksual

Berdasarkan catatan Damar, di Lampung sudah terjadi 47 kasus kekerasan seksual selama Januari hingga April 2016. Untuk itu, Damar mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi prioritas dan masuk pada prolegnas 2016.

Selanjutnya di:

http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/20/damar-minta-pemerintah-buat-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual

⌘ Orasi dan Doa Bersama Untuk Indonesia Bebas Kekerasan Seksual

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menggelar aksi solidaritas dalam rangka keprihatinan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan diisi dengan orasi dari beberapa perwakilan lembaga lain serta doa lintas agama untuk mendoakan agar Indonesia bebas dari segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Selanjutnya di:

http://video.tribunnews.com/view/3852/aksi-lintas-agama-untuk-keprihatinan-maraknya-kekerasan-seksual-tribunnewscom

⌘ Hukum Kebiri Bentuk Pelanggaran HAM

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menolak pemberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penghukuman sebaiknya diganti dengan gagasan penghukuman yang lebih menyelesaikan akar masalah. Dimana prinsip penghukuman harus mendidik, menjerakan, manusiawi, tidak merendahkan martabat, dan juga harus memenuhi rasa keadilan korban.

Selanjutnya di:

http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/20/lembaga-damar-tolak-hukum-kebiri-bagi-pelaku-kekerasan-seksual

Sustriana Saragih,
Asisten Tim Kerja Permampu



WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



Sekretariat PERMAMPU
Jl.Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 Padang Bulan, Medan 20141 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 | e-mail: konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org | Facebook: PermampuConsortium